



LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TRIWULAN III (PERIODE JULI – SEPTEMBER 2025)

Berdasarkan

**Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52
tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan
Instansi Pemerintah**

TRIWULAN III TAHUN 2025

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN
TRIWULAN III (PERIODE JULI – SEPTEMBER 2025)
DI
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2019

Disahkan di Yogyakarta
Pada Hari Selasa, Oktober 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA,



TUTY BUDHI UTAMI, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan YME, akhirnya Tim Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menyelesaikan hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan II dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah khususnya Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada masyarakat, oleh karena itu kami mengadakan survei ini secara berkala sebagai bagian dari rencana dan sasaran mutu dalam pemeliharaan kualitas layanan yang telah dicapai. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

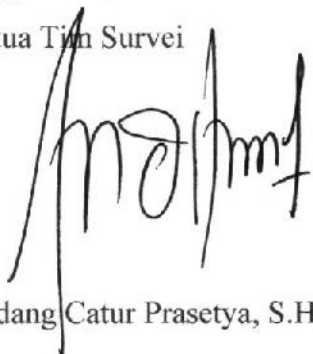
Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi yang dapat diartikan bahwa kepuasan pengguna dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini bertujuan meminta pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang diambil dengan menggunakan aplikasi e-Survey yang dikembangkan oleh Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan - perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas dan masyarakat pengguna layanan kami.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Oktober 2025

Ketua Tim Survei



Andang Catur Prasetya, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Sasaran.....	2
E. Definisi.....	3
BAB II METODOLOGI.....	4
A. METODE PENELITIAN.....	4
B. POPULASI DAN SAMPEL.....	4
C. PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI.....	5
1. PERSIAPAN.....	5
2. PROSES SURVEI.....	5
D. TEKNIK ANALISIS DAN EVALUASI.....	5
E. PROSEDUR SURVEI.....	6
BAB III.....	7
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK).....	7
A. Profil Responden.....	7
1. Jenis Kelamin Responden.....	7
2. Tingkat Pendidikan Responden.....	7
3. Pekerjaan Responden.....	8
4. Kelompok Usia Responden.....	9
B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator.....	9
1. Diskriminasi Pelayanan.....	9
2. Indikator Pelayanan Diluar Prosedur.....	10
3. Penerimaan Imbalan/Suap.....	11
4. Indikator Pungutan Liar.....	12
5. Indikator Percaloan.....	13
C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja.....	13

D. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	14
BAB IV	15
PENUTUP.....	15
A. Kesimpulan	15
B. Rekomendasi.....	15
C. Penutup	15
LAMPIRAN.....	16
1. Total Indeks	16
2. Karakteristik Responden.....	16
3. Nilai Per Unsur	16
4. Tiga Unsur Terendah	17
5. Kuisioner SPAK.....	17
6. Hasil Jawaban Responden.....	18

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jenis Kelamin Responden	8
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden	9
Tabel 3. Jenis Pekerjaan Responden	10
Tabel 4. Domisili Responden.....	11
Tabel 5. Usia Responden	12
Tabel 6. Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan	13
Tabel 7. Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan	14
Tabel 8. Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh.....	15
Tabel 9. Indeks Pada Indikator Pemberian Hadiah.....	16
Tabel 10. Indeks Pada Indikator Percaloan.....	17
Tabel 11. Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang.....	18
Tabel 12. Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia	19
Tabel 13. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	20
Tabel 14. Persepsi Anti Korupsi Pada Direktorat Jenderalla Badan Peradilan Umum.....	21

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Jenis Kelamin Responden.....	8
Grafik 2. Tingkat Pendidikan Responden	9
Grafik 3. Pekerjaan Responden.....	10
Grafik 4. Domisili Responden.....	12
Grafik 5. Rentang Usia Responden	13
Grafik 6. Indikator Manipulasi Peraturan.....	14
Grafik 7. Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	15
Grafik 8. Indikator Menjual Pengaruh	16
Grafik 9. Indikator Pemberian Hadiah	17
Grafik 10. Indikator Percaloan	18
Grafik 11. Indikator Perbuatan Curang	19
Grafik 12. Indikator Transaksi Rahasia.....	20
Grafik 13. Indeks Persepsi Anti Korupsi	2

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem penyelenggaraan pemerintahan disetiap Kementerian / Lembaga (K/L) diharuskan berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, setiap K/L diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap K/L. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai unit eselon I penyelenggara pelayanan publik, maka penting dilakukan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indeks IPAK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di Indonesia yang dikembangkan oleh *Transparency International Indonesia*. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) di lingkup Pengadilan Negeri Yogyakarta.

B. Tujuan

Tujuan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan Pelayanan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

C. Sasaran

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan transparan.
2. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan publik sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

D. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019

E. Definisi

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. 5 (lima) tindakan korupsi terdiri dari:

1. Diskriminasi pada pelayanan
2. Pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan
3. Penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku
4. Pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima
5. Praktek percaloan/perantara yang tidak resmi

BAB II METODOLOGI

A. METODE PENELITIAN

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. POPULASI DAN SAMPEL

Responden ditentukan sesuai dengan jumlah pengguna layanan masing- masing unit dengan memperhatikan tingkat keterwakilan jumlah sampel terhadap populasi melalui sistem pemilihan secara acak. Responden yang dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan masing- masing unit pelayanan.

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan **tabel sampel dari Krejcie and Morgan** (Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lampiran II) atau dihitung dengan menggunakan rumus: $S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$ dimana:

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1 %, 5%, 10 %

N = populasi P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5 d = 0,0

Dengan memperhatikan jumlah pegawai aparaturnya pada lingkungan peradilan umum kurang lebih sebanyak 17.000 orang, maka merujuk pada **tabel sampel dari Krejcie and Morgan** dapat ditentukan jumlah responden sebanyak 375 orang.

C. PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

Survei indeks persepsi korupsi terhadap pelayanan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dilakukan melalui metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyebarkan elektronik kuesioner (e- survey) sebagai alat pengumpul data. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive* sampling atau teknik pengambilan sampel dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian yaitu masyarakat yang menerima pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta selama periode triwulan IV Tahun 2024. Adapun tahapan survei adalah sebagai berikut:

1. PERSIAPAN

- a) Membuat daftar pertanyaan pada kuesioner untuk survei IPAK.
- b) Membangun e-survey berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun.
- c) Membuat surat pengantar pengisian survei melalui e-survey.

2. PROSES SURVEI

- a) Pelaksanaan e-survey dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SISUPER (Sistem Informasi Survei Pelayanan Elektronik) yang telah disematkan pada website Ditjen Badilum.
- b) Penginputan data survei persepsi anti korupsi melalui E- survey dilakukan dengan mengakses link berikut: <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
- c) Melakukan pengecekan secara berkala pada sistem e-survey untuk mengetahui perkembangan e-survey.

D. TEKNIK ANALISIS DAN EVALUASI

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi anti korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 — 4. Nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah, dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling

tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk *skoring*/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi anti korupsi atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 — 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 1 - 4. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 — 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

E. PROSEDUR SURVEI

Responden dapat mengisi e-survey persepsi korupsi terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Yogyakarta baik melalui komputer/laptop/smartphone. Sebelum menjawab e-survey, maka responden harus mengisi data-data pribadi yang terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, Nomor Telpn dan pekerjaan. Untuk mengetahui tingkat IPAK Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, maka responden diharapkan dapat memberikan penilaian yang obyektif dari berbagai indikator yang ada dalam e-survey. Adapun indikator- indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Diskriminasi pada pelayanan
2. Pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan
3. Penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku
4. Pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima
5. Praktek percaloan/perantara yang tidak resmi

BAB III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

A. Profil Responden

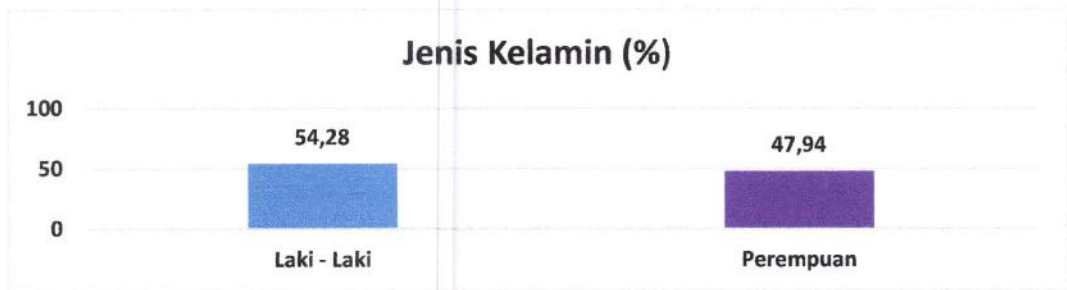
1. Jenis Kelamin Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa total pengguna layanan yang mengisi survei sebanyak 146 reponden, dimana pengguna layanan yang berjenis kelamin Laki — Laki sebanyak 76 orang atau 54,28% dan yang berjenis kelamin Perempuan sebanyak 70 orang atau 47,94%.

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	Laki - Laki	76	54,28
2	Perempuan	70	47,94
Jumlah		146	100

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini;



Grafik 1. Jenis Kelamin Responden

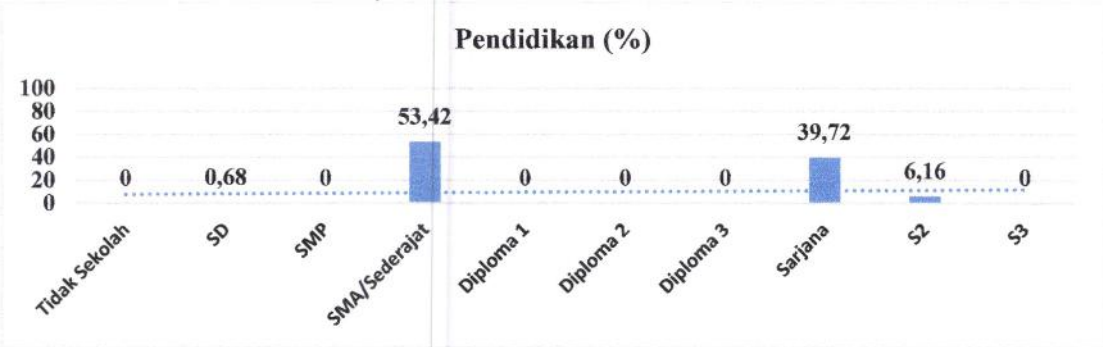
2. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh data sebagai berikut

No	Jenis Pendidikan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	1	0,68
3	SMP	0	0
4	SMA/Sederajat	78	53,42
5	Diploma 1	0	0
6	Diploma 2	0	0
7	Diploma 3	0	0
8	Sarjana	58	39,72
9	S2	9	6,16
10	S3	0	0
Jumlah		146	100

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden

Dari gambaran tabel diatas bahwa dari latar belakang pendidikan, pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mayoritas memiliki latar belakang tingkat pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 78 orang atau 53,42%. Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



Grafik 2. Tingkat Pendidikan Responden

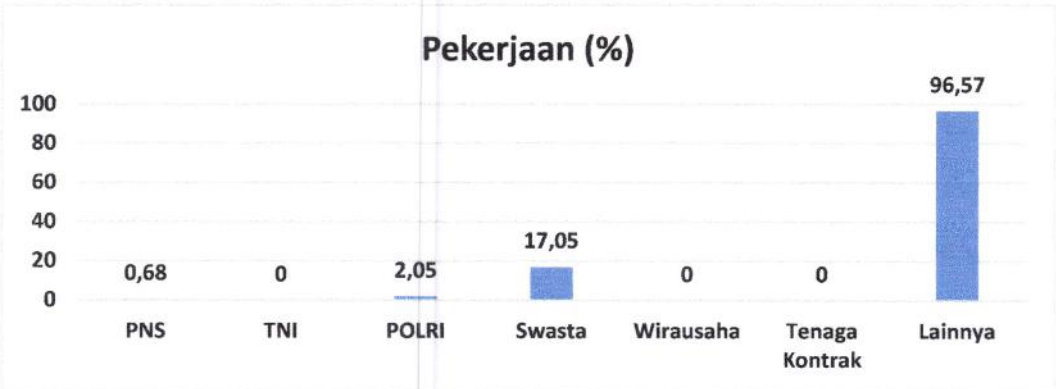
3. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, dari hasil survey diperoleh data sebagai berikut

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	PNS	1	0,68
2	TNI	0	0
3	POLRI	1	2,05
4	Swasta	3	17,05
5	Wirausaha	0	0
6	Tenaga Kontrak	0	0
7	Lainnya	141	96,57
Jumlah		146	100

Tabel 3. Jenis Pekerjaan Responden

Dari table diatas menunjukkan bahwa responden atau mayoritas pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki pekerjaan lainnya sebanyak 141 orang atau 96,57%. Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 3. Pekerjaan Responden

4. **Kelompok Usia Responden.**

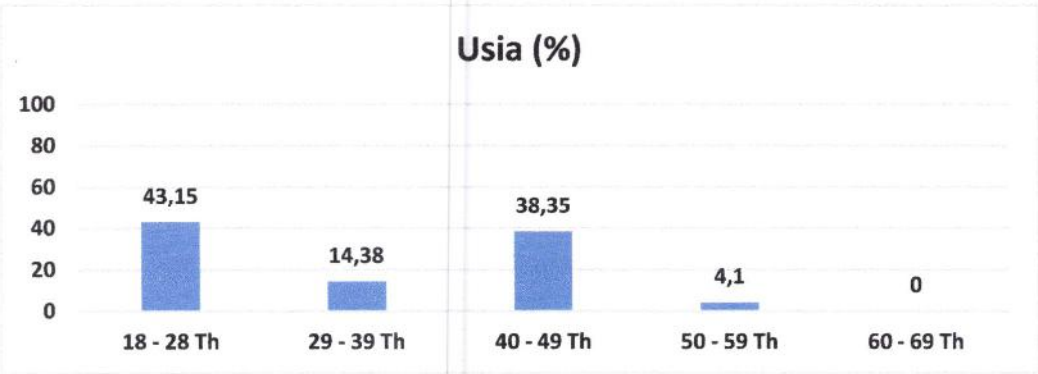
Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan kelompok usia, dari hasil survey diperoleh data sebagai berikut :

Deskripsi	Jumlah (Orang)	% (Persen)
18 - 28 Th	63	43,15
29 - 39 Th	21	14,38
40 - 49 Th	56	38,35
50 - 59 Th	6	4,10
60 - 69 Th	0	0
Total	146	100

Tabel 5. Usia Responden

Dari table diatas menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia 18 – 28 Tahun sebanyak 63 orang dengan prosentase sebesar 43,15% dari total responden sebanyak 146 responden.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 5. Rentang Usia Responden

B. **Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator**

1. **Diskriminasi Pelayanan**

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator diskriminasi pelayanan menunjukkan hasil sebagai berikut :

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	1	0,68
4	Tidak Ada	4	145	99,31
Jumlah			146	100

Tabel 6. Indeks Pada Indikator Diskriminasi Pelayanan

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 6. Indikator Diskriminasi Pelayanan

Dari 146 responden yang menjawab *tidak ada* sebanyak 145 orang atau 99,31% responden menyatakan *tidak ada diskriminasi pelayanan*, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat diskriminasi pelayanan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dan hasil perhitungan dari aplikasi SiSuper diperoleh data sebagai berikut :

DISKRIMINASI PELAYANAN	
Jumlah	583
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kuisisioner)	3,993
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/5)	0,799

Jika table diatas dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 3,993 berada pada kategori “**Sangat baik**”.

2. **Indikator Pelayanan Diluar Prosedur**

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator Pelayanan diluar prosedur menunjukkan hasil sebagai berikut :

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	3	2,05
4	Tidak Ada	4	143	97,94
Jumlah			146	100,00

Tabel 7. Indeks Pada Indikator Pelayanan Diluar Prosedur

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 7. Indikator Pelayanan Dilaur Prosedur

Dari 146 responden yang menjawab *tidak ada* sebanyak 143 orang atau 97,94% responden menyatakan *tidak ada pelayanan dilaur prosedur*, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pelayanan diluar prosedur pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dan hasil perhitungan dari aplikasi SiSuper diperoleh data sebagai berikut :

PELAYANAN DILUAR PROSEDUR	
Jumlah	581
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kuisisioner)	3,979
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/5)	0,796

Jika table diatas dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 3,979 berada pada kategori **“Sangat baik”**.

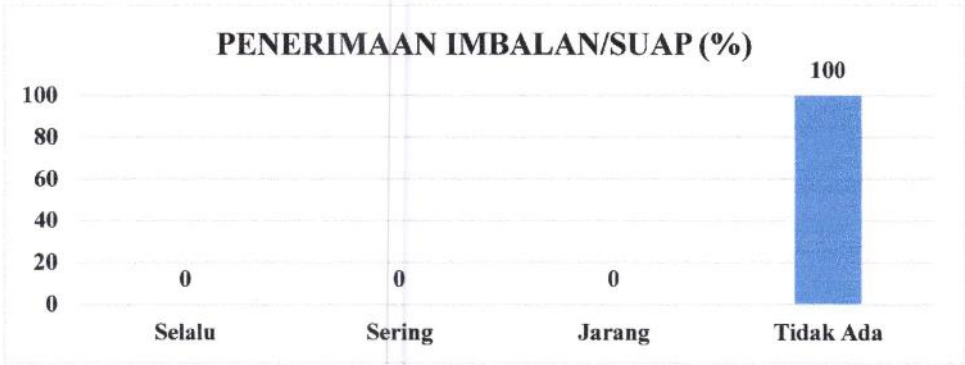
3. **Penerimaan Imbalan/Suap**

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator Penerimaan Imbalan/Suap menunjukkan hasil sebagai berikut :

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	146	0
Jumlah			146	100,00

Tabel 7. Indeks Pada Indikator Penerimaan Imabaln/Suap

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 7. Indikator Penerimaan Imbalan/Suap

Dari 146 responden yang menjawab *tidak ada* sebanyak 146 orang atau 100% responden menyatakan *tidak ada Penerimaan Imbalan/Suap*, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penerimaan imbalan/suap pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dan hasil perhitungan dari aplikasi SiSuper diperoleh data sebagai berikut :

PELAYANAN DILUAR PROSEDUR	
Jumlah	584
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kuisisioner)	4,000
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/5)	0,800

Jika table diatas dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 4,000 berada pada kategori **“Sangat baik”**.

4. Indikator Pungutan Liar

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator Pungutan Liar menunjukkan hasil sebagai berikut :

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	146	100,00
Jumlah			129	100,00

Tabel 7. Indeks Pada Indikator Penerimaan Imabalan/Suap

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 7. Indikator Pungutan Liar

Dari 146 responden yang menjawab *tidak ada* sebanyak 146 orang atau 100% responden menyatakan *tidak ada Pungutan Liar*, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pungutan liar pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dan hasil perhitungan dari aplikasi SiSuper diperoleh data sebagai berikut :

PELAYANAN DILUAR PROSEDUR	
Jumlah	584
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kuisisioner)	4,000
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/5)	0,800

Jika table diatas dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 4,000 berada pada kategori **“Sangat baik”**.

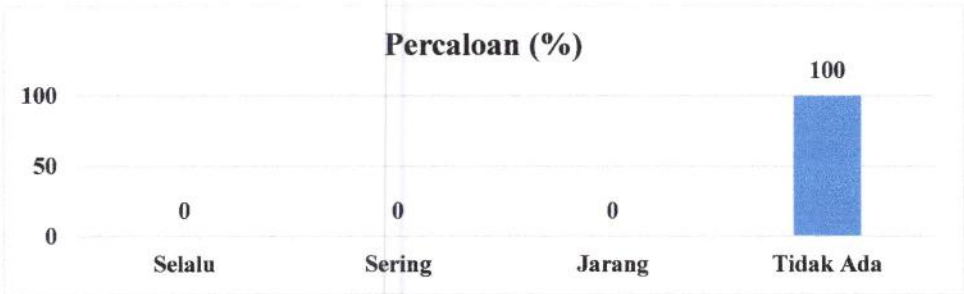
5. Indikator Percaloan

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator Percaloan menunjukkan hasil sebagai berikut :

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	146	0
Jumlah			146	100,00

Tabel 7. Indeks Pada Indikator Percaloan

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 7. Indikator Percaloan

Dari 129 responden yang menjawab *tidak ada* sebanyak 129 orang atau 100% responden menyatakan *tidak ada Pungutan Liar*, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pungutan liar pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dan hasil perhitungan dari aplikasi SiSuper diperoleh data sebagai berikut :

PELAYANAN DILUAR PROSEDUR	
Jumlah	516
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kuisisioner)	4,000
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/5)	0,800

Jika table diatas dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 4,000 berada pada kategori “Sangat baik”.

C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja

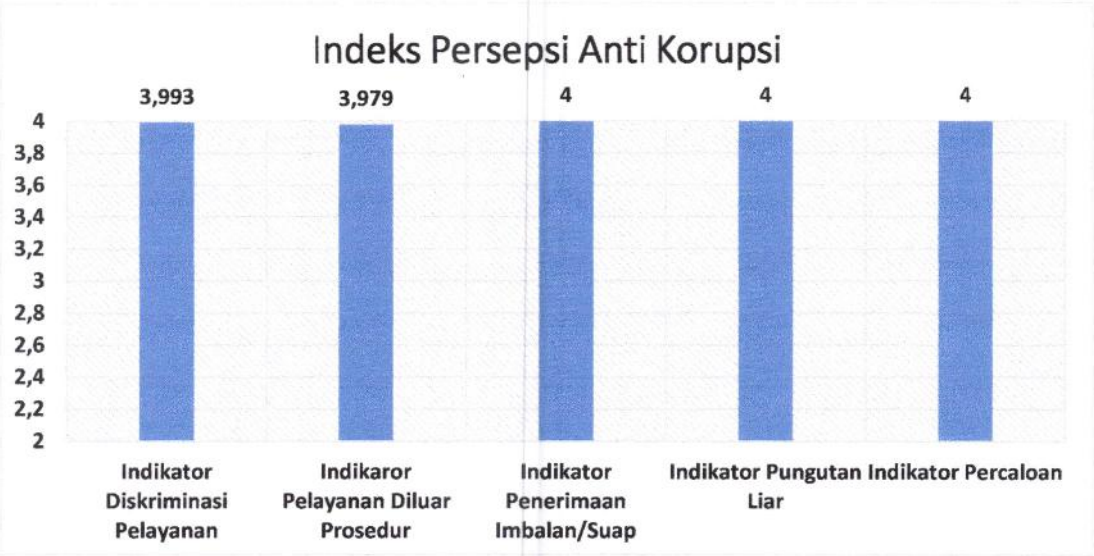
Dari 5 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Yogyakarta sebesar 4,00.

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-Rata	Ranking
Q ¹	Indikator Diskriminasi Pelayanan	3,993	
Q ²	Indikaror Pelayanan Diluar Prosedur	3,979	
Q ³	Indikator Penerimaan Imbalan/Suap	4,000	
Q ⁴	Indikator Pungutan Liar	4,000	
Q ⁵	Indikator Percaloan	4,000	

Tabel 13. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

D. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta.



Grafik 13. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks total 3,99 jika dikonversi menjadi prosentase menjadi 99,86% yang selanjutnya jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**, dimana nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada nilai interval 3,26 – 4.00 dan nilai interval konversi angka 81,26 - 100.

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 62.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100.00	4	Bersih dari korupsi

Tabel 14. Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dinilai bebas dari praktik-praktik koruptif oleh masyarakat pengguna layanan. Hal ini tercermin dari nilai rata-rata pada seluruh indikator yang masing-masing memperoleh skor 4,000, yang termasuk dalam kategori "Sangat Baik". Adapun rincian nilai masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Suap – 4,000
2. Pungutan Liar (Pungli) – 4,000
3. Percaloan – 4,000
4. Diskriminasi Pelayanan – 3,993
5. Pelayanan Diluar Prosedur – 3,979

Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak mengalami atau tidak melihat adanya indikasi tindakan koruptif dalam proses pelayanan publik, baik dalam bentuk diskriminasi, penyimpangan prosedur, suap, pungli, maupun percaloan.

B. Rekomendasi

Meskipun seluruh indikator memperoleh nilai maksimal, upaya pencegahan terhadap praktik korupsi harus tetap dilaksanakan secara berkelanjutan dan konsisten. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi yang dapat dijalankan antara lain:

Mempertahankan integritas dan akuntabilitas pegawai, terutama di unit layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Melakukan sosialisasi berkala tentang zona integritas dan larangan gratifikasi kepada masyarakat dan seluruh pegawai.

Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengaduan masyarakat melalui kanal resmi yang transparan dan mudah diakses. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk meminimalisir kontak langsung antara pengguna layanan dan petugas, sehingga potensi korupsi dapat dicegah.

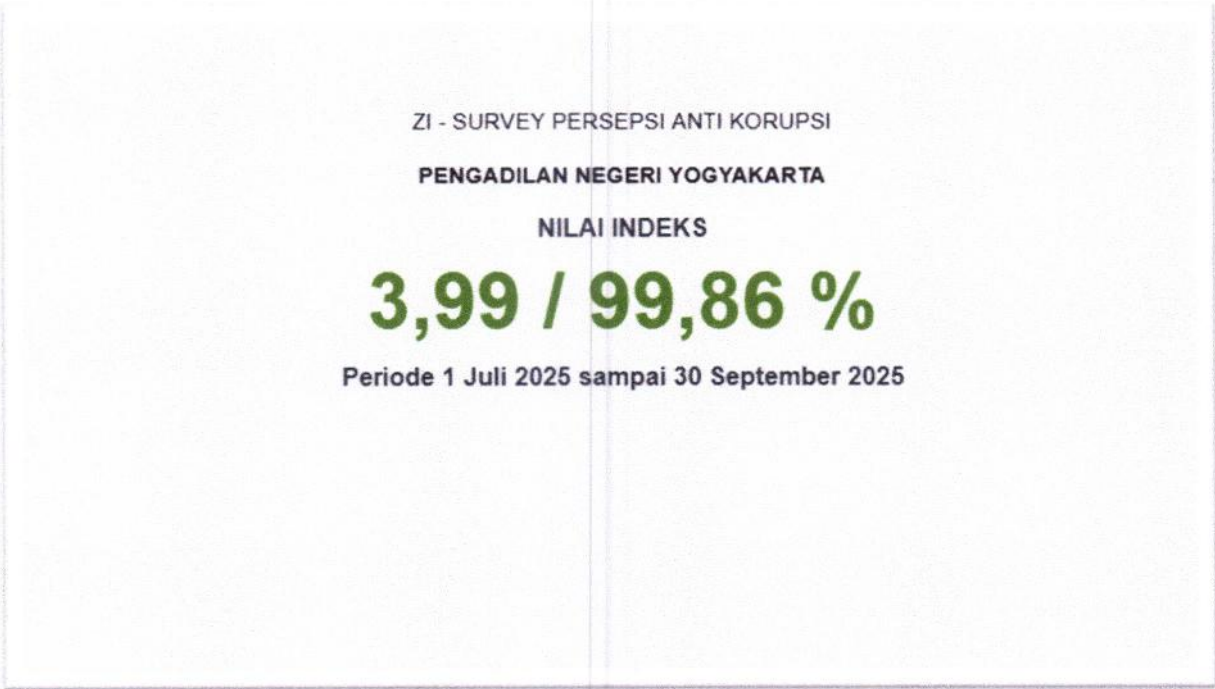
Menindaklanjuti hasil survei ini melalui forum internal, untuk menjaga komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi.

C. Penutup

Survei ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penguatan komitmen institusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari korupsi. Capaian nilai maksimal pada seluruh indikator menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, dan menjadi modal penting dalam membangun pelayanan publik yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.

LAMPIRAN

1. Total Indeks



2. Karakteristik Responden

JUMLAH	146 RESPONDEN		
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 76 ORANG		
	PEREMPUAN : 70 ORANG		
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG		Diploma 2 : 0 ORG
	SD : 1 ORG		Diploma 3 : 0 ORG
	SMP : 0 ORG		S1 : 58 ORG
	SMU : 78 ORG		S2 : 9 ORG
	Diploma 1 : 0 ORG		S3 : 0 ORG
PEKERJAAN	PNS : 1 ORG		SWASTA : 3 ORG
	TNI : 0 ORG		WIRAUSAHA : 0 ORG
	POLRI : 1 ORG		TENAGA KONTRAK : 0 ORG
	LAINNYA : 141 ORG		

3. Nilai Per Unsur

Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	Keterangan
Jumlah	583	581	584	584	584	
NRR Per RL	3,993	3,979	4,000	4,000	4,000	19,973
NRR Tertimbang	0,799	0,796	0,800	0,800	0,800	3,995
IPAK ZI Unit Pelayanan						99,86

4. Tiga Unsur Terendah

3 Unsur Terendah	
No.	Unsur
1	Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?
2	Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?
3	Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?
	Nilai
	581
	583
	584

5. Kuisioner SPAK

Form kuisioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

1 Data Responden
Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan dan Pendidikan...

2 Form Kuisioner
Isian form kuisioner IPA-K

3 Kesan & pesan
mohon isi kesan dan pesan Anda

Data Responden IPA-K

Nama

boleh inisial atau tidak diisi

Umur / Jenis Kelamin *

tahun

Pilih Jenis Kelamin

Nomor HP *

+62

Contoh : 81211112222

Domisili *

Pilih Wilayah

Pendidikan *

Pilih Pendidikan

Pekerjaan *

Pilih Pekerjaan

Layanan *

Pilih Layanan Yang Didapat

1 Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?

☐ Seluruh petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, alimamater dan sejenisnya

☐ Sebagian besar petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, alimamater dan sejenisnya

☐ Sebagian kecil petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, alimamater dan sejenisnya

☐ Seluruh petugas pada pengadilan pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, alimamater dan sejenisnya

2 Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?

☐ Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

☐ Sebagian besar pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

☐ Sebagian kecil pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

☐ Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas tidak sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

3 Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?

☐ Petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

☐ Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

☐ Petugas pelayanan sering menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

☐ Petugas pelayanan selalu menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

4 Apakah tidak ada pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi pada unit layanan ini ?

☐ Petugas layanan tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)

☐ Sebagian besar petugas layanan tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)

☐ Sebagian besar petugas layanan sering meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)

☐ Sebagian besar petugas layanan selalu meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)

5 Apakah tidak ada praktek percaloan/perantara yang tidak resmi yang diterapkan pada unit layanan ini ?

☐ Seluruh petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan

☐ Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan

☐ Petugas pelayanan sering melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan

☐ Petugas pelayanan selalu melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan

17

6. Hasil Jawaban Responden

No.	U1	U2	U3	U4	U5
1	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4
13	4	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4
21	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	4
23	4	3	4	4	4
24	4	4	4	4	4
25	4	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4
28	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4
31	4	4	4	4	4
32	4	4	4	4	4
33	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4
35	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4
38	4	4	4	4	4
39	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4
41	4	4	4	4	4
42	4	4	4	4	4
43	3	4	4	4	4
44	4	4	4	4	4
45	4	4	4	4	4
46	4	4	4	4	4
47	4	4	4	4	4
48	4	4	4	4	4
49	4	4	4	4	4
50	4	4	4	4	4
51	4	4	4	4	4
52	4	4	4	4	4
53	4	4	4	4	4
54	4	4	4	4	4
55	4	4	4	4	4
56	4	4	4	4	4
57	4	4	4	4	4
58	4	4	4	4	4
59	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4
61	4	4	4	4	4
62	4	4	4	4	4

63	4	4	4	4	4
64	4	4	4	4	4
65	4	4	4	4	4
66	4	4	4	4	4
67	4	4	4	4	4
68	4	4	4	4	4
69	4	4	4	4	4
70	4	4	4	4	4
71	4	4	4	4	4
72	4	4	4	4	4
73	4	4	4	4	4
74	4	4	4	4	4
75	4	4	4	4	4
76	4	4	4	4	4
77	4	4	4	4	4
78	4	4	4	4	4
79	4	4	4	4	4
80	4	4	4	4	4
81	4	4	4	4	4
82	4	4	4	4	4
83	4	4	4	4	4
84	4	4	4	4	4
85	4	4	4	4	4
86	4	4	4	4	4
87	4	4	4	4	4
88	4	4	4	4	4
89	4	4	4	4	4
90	4	4	4	4	4
91	4	4	4	4	4
92	4	4	4	4	4
93	4	4	4	4	4
94	4	4	4	4	4
95	4	4	4	4	4
96	4	4	4	4	4
97	4	4	4	4	4
98	4	4	4	4	4
99	4	3	4	4	4
100	4	4	4	4	4
101	4	4	4	4	4
102	4	4	4	4	4
103	4	4	4	4	4
104	4	4	4	4	4
105	4	4	4	4	4
106	4	4	4	4	4
107	4	4	4	4	4
108	4	4	4	4	4
109	4	4	4	4	4
110	4	4	4	4	4
111	4	4	4	4	4
112	4	4	4	4	4
113	4	4	4	4	4
114	4	4	4	4	4
115	4	4	4	4	4
116	4	4	4	4	4
117	4	4	4	4	4
118	4	4	4	4	4
119	4	4	4	4	4
120	4	4	4	4	4
121	4	4	4	4	4
122	4	4	4	4	4
123	4	4	4	4	4
124	4	4	4	4	4
125	4	4	4	4	4
126	4	4	4	4	4
127	4	3	4	4	4
128	4	4	4	4	4

129	4	4	4	4	4
130	4	4	4	4	4
131	4	4	4	4	4
132	4	4	4	4	4
133	4	4	4	4	4
134	4	4	4	4	4
135	4	4	4	4	4
136	4	4	4	4	4
137	4	4	4	4	4
138	4	4	4	4	4
139	4	4	4	4	4
140	4	4	4	4	4
141	4	4	4	4	4
142	4	4	4	4	4
143	4	4	4	4	4
144	4	4	4	4	4
145	4	4	4	4	4
146	4	4	4	4	4